

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PTRaja Grafindo Persada Balai Pustaka, Jakarta
- Bambang Sugono, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Burhanuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Bulan Bintang, Jakarta
- Daeng Naja. 2010. *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa*
- H.D. Van Wijk/Willem Konjinenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, 2008, *Mengenai Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Ctk. Kedua, edisi Pertama, Laksbang Meditama, Surabaya
- Hendra Kariangan, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Alumni, Bandung
- Indi Aunullah, 2008, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja jilid 2*, Insani Madani, Yogyakarta
- Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Indroharto. 2000. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Istiqamah, 2011, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin Press
- Ita Musarrofa, 2014, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, UIN SA Press, Surabaya
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Khudaifah Dimiyati dan Kelik Wardianto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta
- Lamet Abidin dan Aminuddin, *Op, Cit*, h;m 9-11
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hannindita Offset, Yogyakarta
- Miftah Toha, 1990, *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Ni Ketut riani, 2021, *Op. Cit*, hlm. 2449
- Puji Astuti, 2018, *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Klaten

- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sadjiono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Laks Bang Pressindo : Bandung
- Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- SF. Marbun. 1997. *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Adminitrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Manakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta
- Subekti dan R. Tjrosoedibro, 1979, *Kamus Hukum*, PradnyaParamita, Jakarta
- Sulaiman Rasjid, 1993, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta
- Sulaiman, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pena, Banda Aceh
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Vivi Kurniati, 2019, *Nikah Siri*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta
- Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, 2019, *Tertib Administrasi Kependudukan*, Cempaka putih

Jurnal:

- Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina, “Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)”, *Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2016
- Aulia Athaya Septina, 2021,” Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri”, *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume. 9, No. 1, 2021, hlm. 12.
- Drs. Ali Uraidy, M.H., “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal 990.
- Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, *Jurnal*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial

RI,2017.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Skripsi :

Jeni Selviona, 2018, *Analisi Sistem dan Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru

Retnami, Setya. “ Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,” Makalah Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000

Internet:

www.KamusBahasaIndonesia.org diakses pukul 19.45 Wib tanggal 25september2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kenpendudukan, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 jam 21.23 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170309140234-185-198990/mengenal-fungsi-biometrik-chip-di-e-ktip>. Diakses pada 15 Maret 2023 jam 14.28 WIB

<http1s://www.bankjim.com/2016/09/manfaat-dan-kegunaan-akta-kelahiran.html> diakses pada 15 Maret 2023 jam 14.48 WIB

